



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ISNAINI**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **832193**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **328.196.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m²/139 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 129.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/104 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 198.996.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **29.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SUPRA X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 / 1978 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA NF125SD/SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **44.150.578**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **401.346.578**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **401.346.578**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.